



Rp3,3 Juta Dinilai Layak

Menanti Penetapan Upah Kota Yogyakarta 2021

Upah murah yang ditetapkan dari tahun ke tahun, berpotensi melestarikan kemiskinan, sekaligus ketimpangan di Kota Yogyakarta.

Deenta Julliant

YOGYA. TRIBUN - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta mendesak Wali Kota Haryadi Suyuti menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021, dengan besaran sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sekretaris DPC KSPSI Kota Yogyakarta, Deenta Julliant Sukma mengatakan, untuk mencapai KHL itu, setidaknya UMK Kota Yogyakarta ada di kisaran Rp3.356.521. Jumlah tersebut, tentu masih sangat jauh dari UMK 2020 ini, yang baru menyentuh nominal Rp2.004.000.

"Upah murah yang ditetapkan dari tahun ke tahun, berpotensi melestarikan kemiskinan, sekaligus ketimpangan di Kota Yogyakarta. Terlebih, akan sangat susah bagi pekerja untuk melepaskan diri dari lingkaran setan kemiskinan," ujarnya, Senin (2/11).

Menurutnya, hal tersebut juga menyebabkan buruh di Kota Yogyakarta, atau DIY umumnya, tidak mampu membeli tanah dan rumah. Pasalnya, lonjakan harga semakin tak terjangkau oleh buruh dengan upah murah meski produktivitasnya tinggi.

"Oleh sebab itu, kami juga menuntut Gubernur DIY dan Wali Kota Yogyakarta, untuk membangun perumahan, atau rumah layak huni," ujarnya.

● ke halaman 11

MEMPERJUANGKAN UPAH

- Pembahasan UMK 2021 di DIY segera dilakukan pekan ini, seperti yang akan dilaksanakan oleh Pemkot Yogyakarta.
- Pembahasan ini dijadwalkan paling akhir 19 November untuk kemudian diumumkan pada 20 November.
- Kalangan buruh menilai upah layak untuk Kota Yogyakarta adalah Rp3.356.521.
- Jumlah tersebut masih jauh dari UMK 2020 yakni Rp2.004.000, yang merupakan UMK tertinggi di wilayah DIY.
- UMP DIY 2021 ditetapkan menjadi Rp1.765.000, atau naik 3,54 persen (Rp60.392) dari UMP DIY 2020.
- Meski UMP naik, saat ini belum bisa dipastikan apakah UMK mengikuti atau tidak, karena diiringi berbagai pertimbangan.
- Pembahasan Dewan Pengupahan yang berisi unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah akan menjadi penentu berapa besaran UMK 2021.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Din. Kop. UKM Nakertrans	☐ Negatif	☐ Amat S
2.	☐ Positif	☐ Segera
3.	☒ Netral	☐ Biasa
4.	☒ Segera	
5.		

✓ Untuk diketahui

DRAFTS/RENOVA BAKHTIAN

Rp3,3 Juta Dinilai

• Sambungan Hal 1

mah susun bagi pekerja atau buruh, dengan melibatkan serikat pekerja secara aktif," jelasnya.

Lebih lanjut, Deenta juga menuntut Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk merevisi keputusan tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sesuai SK Nomor 319/KEP/2020, UMP DIY ditetapkan menjadi Rp1.765.000, atau hanya naik 3,54 persen.

"Gubernur DIY seperti hendak memupuskan harapannya, untuk mengurangi penduduk miskin, maupun ketimpangan, sebagaimana disampaikan dalam pidato visi-misi Gubernur DIY 2017-2022," tambah Deenta.

Ia berujar, di tengah ancaman resesi, kebijakan upah murah 2021 ini justru berpotensi memangkas daya beli masyarakat. Padahal, untuk meningkatkan upaya peningkatan perekonomian menghadapi resesi yang diakibatkan pandemi virus corona. "Ditambah lagi, UU Ciptaker, serta SE Menaker tentang pengupahan, semakin memperburuk kondisi masyarakat Yogyakarta yang berprofesi sebagai pekerja atau buruh," pungkash Deenta.

Pembahasan

Pemkot Yogyakarta tengah berancang-ancang melakukan pembahasan terkait UMK untuk tahun 2021. Pandemi Covid-19 pun disebut jadi satu

pertimbangan mengenal naik atau tidaknya UMK ke depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menguraikan, dalam penetapan UMK ini, pihaknya harus mendasarkan pada UMP yang sudah ditetapkan lebih dahulu tempo hari.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri telah menetapkan UMP DIY tahun 2021 sebesar Rp1.765.000, atau naik 3,54 persen, artinya bertambah Rp60.392 dari UMP yang berlaku tahun ini, yakni Rp1.704.608. Keputusan tersebut, tercantum dalam SK Nomor 319/KEP/2020.

"Tentu kita mendasarkan pada UMP. Kemudian, yang kedua, besok Rabu (4/11) kita ketemu dan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta. Ya, kita memang masih diberi kesempatan untuk menetapkan UMK sampai tanggal 19 November," ungkapny, Senin (2/11).

UMK Kota Yogyakarta sendiri, tahun ini, tercatat berada di angka Rp2.004.000 dan yang tertinggi dibandingkan daerah lain di DIY. Walau begitu, meski UMP mengalami kenaikan, Kadri belum bisa memastikan apakah UMK-nya bakal mengikuti, karena harus diiringi sekian banyak pertimbangan.

"Pertimbangannya meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, juga kebutuhan hidup layak (KHL). Untuk survei KHL kita tetap jalan, ya. Baik se-

belum pandemi, maupun setelah pandemi ini, kita survei semua," terangnya.

"Jadi, kita tidak bisa bicara naik atau tidaknya sekarang, ya, karena masing-masing pihak kan punya aspirasi. Nanti akan kita kemukakan semua dalam pembahasan bersama dewan pengupahan hari Rabu besok," imbuh Kadri.

Pertimbangan

Pria yang juga menjabat Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Bidang Perekonomian Kota Yogyakarta tersebut mengakui, pandemi Covid-19 ini jadi salah satu pertimbangan dalam penetapan UMK tahun depan. Sebab, dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. "Tentu itu jadi pertimbangan juga. Tapi, yang jelas UMP tetap jadi batas minimal, sehingga UMK yang ditetapkan oleh kota dan kabupaten harus di atas UMP," urainya.

Sedangkan arahan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziah melalui Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 yang menginstruksikan daerah, supaya menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021 dengan nilai upah minimum 2020, dinilainya tidak lantas wajib diikuti.

"SE tidak bisa jadi dasar hukum atau lantas diharuskan, itu tidak. Karena sesuai aturan perundang-undangan, ya, harus dibahas dulu di dewan pengupahan, diusulkan, kemudian ditetapkan kepala daerah," papar Kadri. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005